

HUBUNGAN MASYARAKAT
DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

MONITOR BERITA

T

- BISNIS INDONESIA
- KOMPAS
- KORAN TEMPO
- MEDIA INDONESIA
- NERACA
- PIKIRAN RAKYAT
- RAKYAT MERDEKA
- REPUBLIKA
- SUARA KARYA
- SUARA PEMBARUAN

- INVESTOR DAILY
- SINAR HARAPAN
- THE JAKARTA POST
- MAJALAH GATRA
- MAJALAH TEMPO
- MAJALAH FORUM
- MAJALAH PILARS
- MAJALAH TRUST
-

KODE : LISTRIK
 MIGAS

GEOLOGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
 UMUM

JAN FEB MAR APR MEI JUN JUL AGST SEPT OKT NOV DES
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

HALAMAN : 21

TAHUN 2

Pemerintah Percepat Penyelesaian PP Kelistrikan

JAKARTA - Pemerintah mempercepat penyelesaian Peraturan Pemerintah (PP) tentang Penyediaan dan Pemanfaatan Tenaga Listrik, sebagai payung hukum sementara pengganti UU No 20/2002 tentang Ketenagalistrikan yang telah dibatalkan Mahkamah Konstitusi (MK).

"Kami (Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral/ DESDM, red) sedang membahas PP itu bersama Departemen Kehakiman. Diharapkan bisa selesai sebelum pelaksanaan *Infrastructure Summit* di Jakarta, 17 Januari 2005," kata Direktur Jenderal Listrik dan Pemanfaatan Energi (LPE) Departemen ESDM Yogo Pratomo di Jakarta, Rabu (5/1).

Yogo menjelaskan, PP itu tetap menempatkan PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) sebagai pemain tunggal di bisnis kelistrikan nasional. Namun, te-

tap memungkinkan investor swasta nasional dan asing bermitra dengan BUMN kelistrikan itu. "Jadi, kesempatan bagi swasta tetap terbuka untuk berperan serta dalam bisnis kelistrikan, khususnya untuk proyek pembangkit, transmisi dan distribusi," kata Yogo.

Dalam forum *Infrastructure Summit* mendatang, pemerintah akan lebih banyak menawarkan proyek pembangkit kepada negara-negara peserta, karena proses pembangunannya dinilai lebih cepat.

"Karena itu, dalam PP juga akan dilampirkan Rencana Umum Ketenagalistrikan Nasional (RUKN) yang memuat rencana kualitatif proyek kelistrikan PLN dan proyek yang akan ditawarkan swasta dan asing di *Infrastructure Summit*," jelas Yogo.

Yogo juga mengatakan, dalam waktu bersamaan, pemerintah

juga sedang mempersiapkan UU Ketenagalistrikan versi baru. "Saat ini, draf UU awal sudah ada. Tapi pemerintah akan membahasnya lagi bersama PLN, masyarakat ketenagalistrikan, perguruan tinggi, dan instansi lainnya," kata Yogo.

Menurut Yogo, dalam UU baru nantinya tidak lagi pola pemecahan aset (*unbundling*) karena dinilai bertentangan dengan UUD 1945. Pola kerja sama PLN dengan swasta akan dilaksanakan melalui tender, kecuali untuk pembangkit energi terbarukan seperti hidro, panas bumi, angin, surya, dan mulut tambang.

Selain itu, pemerintah pusat juga akan mengembalikan kewenangan izin kelistrikan dan perencanaan di daerah kepada masing-masing pemerintah daerah (pemda). Hal ini sesuai dengan ketentuan otonomi daerah. (lim)

HUBUNGAN MASYARAKAT
DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

MONITOR BERITA

BISNIS INDONESIA
 KOMPAS
 KORAN TEMPO
 MEDIA INDONESIA
 NERACA
 PIKIRAN RAKYAT
 RAKYAT MERDEKA
 REPUBLIKA
 SUARA KARYA
 SUARA PEMBARUAN

INVESTOR DAILY
 SINAR HARAPAN
 THE JAKARTA POST
 MAJALAH GATRA
 MAJALAH TEMPO
 MAJALAH FORUM
 MAJALAH PILARS
 MAJALAH TRUST

KODE: LISTRIK
 MIGAS

GEOLOGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
 UMUM

JAN FEB MAR APR MEI JUN JUL AGST SEPT OKT NOV DES
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

HALAMAN: 6.5

TAHUN 2

"PLN Harus Buat Pernyataan Penurunan Susut Secara Hukum"

JAKARTA — Penurunan susut (*losses*) pada PT PLN Unit Bisnis Distribusi Jakarta Raya dan Tangerang dari 14,93 persen menjadi 9,73 persen harus dinyatakan dalam surat pernyataan dan bisa dipertanggungjawabkan secara hukum. Jika penurunan susut tersebut tidak benar, para pemimpin PLN bisa dikenai sanksi pidana.

Desakan tersebut diungkapkan pengamat kelistrikan Tri Mumpuni Iskandar Kuntoadji kepada *Tempo* kemarin. Menurut dia, dengan membuat surat pernyataan dan diberitahukan kepada publik,

pemimpin PLN terikat secara hukum. "Apa pun yang dipublikasikan oleh PLN harus ada konsekuensi hukumnya," ujarnya.

Bila ditemukan unsur manipulasi dalam penurunan susut distribusi PLN, kata Mumpuni, pemimpin PLN harus bersedia dituntut secara hukum. "Cara sebagai bentuk pertanggungjawaban manajemen PLN kepada publik," katanya. Menurut perempuan yang bergiat dalam pembangunan listrik pedesaan ini, "Listrik merupakan kebutuhan hajat hidup orang banyak,

dan publik harus tahu apa yang dilakukan PLN."

Seperti diberitakan *Tempo*, PLN Distribusi Jakarta dan Tangerang diduga telah melakukan manipulasi penurunan angka susut. Manipulasi dilakukan dengan cara menggelembungkan energi listrik pemakaian sendiri hingga 12 kali lipat atau 3 atau 3,47 persen. Pemakaian sendiri merupakan energi yang digunakan untuk menerangi peralatan dan gardu listrik. Penggunaan listrik pemakaian sendiri sebenarnya tidak lebih dari 0,1 persen

dari total energi yang dijual.

Susut merupakan kerugian energi akibat masalah teknis dan nonteknis. Masalah teknis disebabkan oleh kualitas daya hantar listrik. Semakin bagus kualitas daya hantar listrik semakin rendah susut yang terjadi. Sementara itu, susut nonteknis diakibatkan oleh kesalahan pencatatan, pemasukan data, dan lainnya. Jika terjadi penurunan susut, akan berdampak pada peningkatan pendapatan penjualan energi listrik.

Sebelumnya, Dewan Komisaris PLN akan membentuk tim audit susut untuk melakukan pengkajian terjadinya penurunan efisiensi perusahaan listrik milik pemerintah itu. Anggota Dewan Komisaris Lutfi Hamid mengatakan, tim audit terbentuk pekan lalu dan akan melakukan audit susut di seluruh Indonesia.

Lutfi menjelaskan, pembentukan tim dilakukan agar tidak terjadi praduga mengenai penurunan susut di PLN, khususnya untuk wilayah Jakarta dan Tangerang dari 14,93 persen menjadi 9,73 persen. Dia memperki-

rakan dalam jangka waktu empat bulan semua data sudah bisa dilaporkan oleh tim audit susut. "Karena audit yang dilakukan di seluruh Indonesia dan membutuhkan waktu lama," ujarnya mengenai lamanya tim bekerja.

Namun, Mumpuni menilai, audit susut harus dilakukan oleh tim independen dari luar PLN. "Yang terlibat dalam tim audit harus orang yang ahli dan memiliki integritas," ujarnya. Dia meyakini independensi tim audit yang dibentuk PLN.

● ali nur yasin

HUBUNGAN MASYARAKAT
DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

MONITOR BERITA

BISNIS INDONESIA
 KOMPAS
 KORAN TEMPO
 MEDIA INDONESIA
 NERACA
 PIKIRAN RAKYAT
 RAKYAT MERDEKA
 REPUBLIKA
 SUARA KARYA
 SUARA PEMBARUAN

INVESTOR DAILY
 SINAR HARAPAN
 THE JAKARTA POST
 MAJALAH GATRA
 MAJALAH TEMPO
 MAJALAH FORUM
 MAJALAH PILARS
 MAJALAH TRUST

KODE : LISTRIK
 MIGAS

GEOLOGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
 UMUM

JAN FEB MAR APR MEI JUN JUL AGST SEPT OKT NOV DES
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

HALAMAN : 21

TAHUN 20

Amerada Hess Pasok Gas untuk PLN

GRESIK— Pada 2006, perusahaan minyak dan gas Amerada Hess Indonesia akan memasok kebutuhan gas untuk PT Pembangkitan Jawa Bali (PJB), anak perusahaan PT Perusahaan Listrik Negara (PLN), sebanyak 100 juta kaki kubik per hari (*mile-mile cubic feet per day/MMCFD*).

"Hal itu sesuai kesepakatan yang telah ditandatangani pada 12 Desember 2004," kata *Government & Stakeholders Relation Manager* Amerada Hess Indonesia, Didik Sasono Setyadi di Gresik, Rabu (5/1).

Menurut dia, pasokan untuk PJB ini sudah sesuai dengan proyeksi hasil eksplorasi dari tiga titik sumur pengeboran yang dilakukan di lepas pantai kecamatan Ujung Pangkah Kulon, kecamatan Ujung Pangkah Utara, dan sumur Sidayu.

Hasil eksplorasi dari ketiga sumur tersebut diperkirakan akan menghasilkan gas sebanyak 440 miliar kaki kubik (*billion cubic feet/BCF*) yang bisa dieksploitasi selama 21 tahun. Sementara untuk produksi tetap, diperkirakan berlangsung selama tujuh tahun.

Menurut Didik, sejak awal eksplorasi, pihaknya berkomitmen untuk mengutamakan kebutuhan gas bagi PLN. "Namun Amerada Hess tak menutup ke-

ungkinan melayani konsumen selain seperti Perusahaan Gas Negara, PT Petrokimia Gresik, atau PT Smelting yang juga sangat membutuhkan pasokan gas," jelasnya.

Sesuai perjanjian dengan PLN, penyaluran gas akan dimulai pada 2006 bertepatan dengan selesainya pembangunan infrastruktur jaringan pipa penyaluran gas dari *platform* Ujung Pangkah ke *processing facility* pembangkitan PLN Gresik, sepanjang kurang lebih 51,5 kilometer (km).

Dia menjelaskan, dari *platform* akan dipasang pipa sepanjang 41,7 km menuju areal *processing facility* dekat pelabuhan Maspion Gresik. Kemudian, pipa akan ditambah menuju pembangkit PLN Gresik sepanjang 9,8 km.

Pembangunan infrastruktur tersebut diperkirakan berlangsung selama 18–22 bulan. Menurut rencana, pembangunan itu akan dimulai pada triwulan pertama 2005 (*ros*)

HUBUNGAN MASYARAKAT
DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBEK DAYA MINERAL

MONITOR BERITA

- BISNIS INDONESIA
- KOMPAS
- KORAN TEMPO
- MEDIA INDONESIA
- NERACA
- PIKIRAN RAKYAT
- RAKYAT MERDEKA
- REPUBLIKA
- SUARA KARYA
- SUARA PEMBARUAN

- INVESTOR DAILY
- SINAR HARAPAN
- THE JAKARTA POST
- MAJALAH GATRA
- MAJALAH TEMPO
- MAJALAH FORUM
- MAJALAH PILARS
- MAJALAH TRUST
-

KODE : LISTRIK
 MIGAS

GEOLOGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
 UMUM

JAN FEB MAR APR MEI JUN JUL AGST SEPT OKT NOV DES
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

HALAMAN : 5

TAHUN 20

Dana Konsumen PLN

Kami sebagai konsumen PLN sangat kecewa dengan pelayanan PLN Kantor Cabang Bandengan. Kami biasa membayar tagihan listrik melalui autodebet Bank Permata. Pada 9 November, kami mengecek tagihan bulan November (pemakaian Oktober) lewat telepon dan dijawab oleh petugas sebesar Rp 890.400. Ternyata setelah kami cek di Bank Permata, jumlah yang diautodebet sebesar Rp 4.195.465 (hampir lima kali lipat dari tagihan biasanya).

Setelah kami pertanyakan ke Kantor PLN Bandengan, dengan entengnya petugas menjawab bahwa hal itu adalah kesalahan konsumen karena terlambat melapor ke PLN. Sedangkan dengan pembayaran sistem autodebet, jumlah yang didebet oleh bank baru diketahui setelah autodebet terjadi. Dan, menurut petugas PLN, kelebihan pembayaran sebesar Rp 3.228.368 yang sudah terbayar lewat autodebet tersebut tetap

tidak bisa dikembalikan lagi dan hanya dapat dikompensasi untuk pembayaran tagihan bulan-bulan berikutnya.

Di mana tanggung jawab PLN? Apakah ada unsur kesengajaan atau instruksi dari atasan? Apakah hal ini praktik lama yang masih dipertahankan PLN untuk mengumpulkan dana terselubung? Disimpan di mana dana kelebihan bayar konsumen oleh PLN? Yang pasti, kami bukanlah satu-satunya konsumen yang mengalami hal ini. Dan, mungkin hanya satu dari sejuta konsumen dengan kasus serupa.

Mohon tindakan dari pemimpin-pemimpin tinggi PLN untuk membenahi manajemen PLN dan mengusut tuntas kasus ini agar di kemudian hari tidak ada lagi konsumen yang dirugikan, dan merasa puas dengan pelayanan PLN.

PURNOMO
DAMARWULAN
Kronjo, Kabupaten Tangerang

4

HUBUNGAN MASYARAKAT
DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

MONITOR BERITA

- BISNIS INDONESIA
- KOMPAS
- KORAN TEMPO
- MEDIA INDONESIA
- NERACA
- PIKIRAN RAKYAT
- RAKYAT MERDEKA
- REPUBLIKA
- SUARA KARYA
- SUARA PEMBARUAN

- INVESTOR DAILY
- SINAR HARAPAN
- THE JAKARTA POST
- MAJALAH GATRA
- MAJALAH TEMPO
- MAJALAH FORUM
- MAJALAH PILARS
- MAJALAH TRUST
-

KODE: LISTRIK
 MIGAS

GEOLOGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
 UMUM

JAN FEB MAR APR MEI JUN JUL AGST SEPT OKT NOV DES
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

HALAMAN: 20

TAHUN 2005

Jika BBM Naik 40 Persen PLN Perlu Tambahkan Biaya Rp 8 Triliun

BELUM pulih dari krisis moneter 1997, kini PLN dihadapkan pada tantangan baru yang cukup berat yakni tingginya kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) yang direncanakan akan diberlakukan mulai awal tahun ini.

Dirut PT PLN (Persero), Eddie Widiono, mengatakan PLN membutuhkan tambahan biaya sedikitnya Rp 8 triliun bila kenaikan BBM tahun ini mencapai 40 persen. Untuk menutupi kebutuhan tambahan biaya BBM tersebut, tarif dasar listrik (TDL) mesti naik rata-rata 12 persen setahun.

Namun, menurut dia, kenaikan tarif listrik sebesar itu akan memberatkan konsumen PLN, terutama konsumen industri yang saat ini banyak menghadapi kesulitan.

Selain itu, kata Eddie, sebagian pelanggan industri banyak yang menilai tarif listrik PLN sudah terlalu mahal sehingga mereka mencari solusi sendiri. Ini terindikasi dari penurunan konsumsi pelanggan industri tahun 2004.

Disebutkan contoh di Jabar sudah ada tiga Pembangkit Tenaga Listrik Tenaga Uap (PLTU) batubara yang akan dibangun sendiri oleh pihak industri. Gejala seperti ini tentunya harus diperhatikan oleh PLN karena pelanggan industri selama ini sudah terkena kewajiban untuk ikut mensubsidi pelanggan rumah tangga kecil.

Pangsa penjualan dari pelanggan rumah tangga kecil (R1/450 VA) saat ini hanya 17 persen, sementara pendapatannya hanya 10,5 persen. Dari data-data pendapatan PLN sebesar Rp 580 per kWh, pendapatan dari pelanggan R1/450 VA itu PLN hanya mendapatkan Rp 403 per kWh.

Sedangkan dari pelanggan industri I-1 sudah mencapai Rp 565 per kWh, sehingga perbedaannya sangat besar. Apabila perbedaan tarif rumah tangga kecil dan industri dibiarkan melebar, dikhawatirkan PLN akan kehilangan pelanggan industri yang selama ini memberikan efisiensi bagi perusahaan.

Oleh karena itu, kata Eddie, sudah saatnya PLN memikirkan dan mencari terobosan-terobosan melalui berbagai bentuk produk

layanan yang dapat mendorong harga jual bagi pelanggan rumah tangga kecil.

Di saat yang sama, pemberian kepuasah terhadap pelanggan industri perlu terus menerus ditingkatkan sehingga terbentuk persepsi, kendati tarif listrik PLN ma-

hal tetapi mereka dapat merasakan nilai tambah yang besar.

Untuk menghadapi kenaikan harga BBM yang besar tersebut, katanya, langkah pertama yang harus dilakukan adalah menurunkan biaya produksi dengan mencari ruang-ruang mana saja untuk melakukan efisiensi di tubuh PLN sendiri.

Diakukannya bahwa *losses* (susut jaringan) secara nasional sudah mampu ditekan dari 18,5 persen menjadi 12,6 persen tahun 2004. Tahun 2005 ini harus bisa diturunkan sampai pada angka 9,8 persen.

"PLN bukan ingin gagah-gagahan, tapi masyarakat ingin melihat apa saja yang dilakukan PLN, sebelum dikenakan kenaikan tarif listrik sebagai dampak dari kenaikan harga BBM tersebut," katanya dalam Rapat Kordinasi Distribusi (Rakor Dis) tahun 2004 di Jawa-Bali di Surabaya baru-baru ini.

Untuk menurunkan susut sebesar dua persen tahun 2006, PLN akan menyedikan anggaran investasi yang cukup besar. Hasil penurunan *losses* sebanyak dua persen tersebut hanya dapat menurunkan biaya sebesar Rp 1,2 triliun.

Karena itu, lanjutnya, dari sisi pembangkitan harus dilakukan penghematan antara lain melalui optimalisasi *fuel-mix*, upaya pengurangan pemakaian BBM dan lain-lain. Selain itu, manajemen PLN juga akan meminta bantuan pemerintah meninjau kembali faktor-faktor produksi yang memberikan andil terhadap pembengkakan biaya seperti perpajakan.

Pada saat bersamaan PLN harus melakukan pendekatan terhadap para pelanggan dengan memberikan penjelasan bahwa apabila PLN tidak dapat meredam kenaikan BBM dengan langkah-langkah tadi, maka pada saat PLN meminta kenaikan tarif listrik, pelanggan sudah melihat bahwa PLN telah

berusaha maksimal untuk mengurangi beban pelanggan.

Dengan latar belakang tersebut, ada beberapa langkah strategis yang dapat dilakukan, antara lain mengkaji disain jaringan distribusi untuk mendapatkan tingkat losses yang rendah dan keandalan distribusi yang tinggi. Menakan susut distribusi dengan melakukan kajian *Automatic Meter Reading* (pembacaan meteran secara otomatis) serta melakukan kajian kualitas pengukuran listrik.

Langkah lainnya adalah mengoptimisasi pendapatan, peningkatan pelayanan, *revenue protection*, penyempurnaan tata usaha langganan dan mengkaji transaksi niaga di ihulu serta melakukan sosialisasi pencegahan terhadap pencurian tenaga listrik dan penerangan jalan umum (PJU) secara liar dengan mengajak masyarakat untuk menggunakan tenaga listrik secara baik dan benar terhadap PJU liar.

Di bidang keuangan, diupayakan adanya keseragaman kode akuntansi dengan kode anggaran. Hal ini untuk mempermudah melakukan identifikasi berdasarkan aktivitasnya, sehingga informasi biaya menjadi lebih akurat. ● MAF

HUBUNGAN MASYARAKAT
DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

MONITOR BERITA

BISNIS INDONESIA
 KOMPAS
 KORAN TEMPO
 MEDIA INDONESIA
 NERACA
 PIKIRAN RAKYAT
 RAKYAT MERDEKA
 REPUBLIKA
 SUARA KARYA
 SUARA PEMBARUAN

INVESTOR DAILY
 SINAR HARAPAN
 THE JAKARTA POST
 MAJALAH GATRA
 MAJALAH TEMPO
 MAJALAH FORUM
 MAJALAH PILARS
 MAJALAH TRUST

KODE : LISTRIK
 MIGAS

GEOLOGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
 UMUM

JAN FEB MAR APR MEI JUN JUL AGST SEPT OKT NOV DES
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

HALAMAN : 4

TAHUN 2005

BBM Terbatas, Aliran Listrik di Meulaboh Enam Jam/Hari

Jakarta, Sinar Harapan

Kondisi kelistrikan di Kota Meulaboh, Nanggroe Aceh Darussalam (NAD) kian membaik setelah PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) berhasil membangun jaringan distribusi sepanjang 30 km. Keterangan tertulis PT PLN, di Jakarta, Selasa (4/1) menyebutkan, petugas teknisi PLN terus berupaya mengalirkan listrik ke tempat-tempat penampungan pengungsi.

Namun, karena keterbatasan persediaan bahan bakar minyak (BBM) yaitu hanya 50.000 kilo liter, aliran listrik cu-

ma bisa dilakukan selama enam jam per hari, dengan cadangan yang tersedia cukup untuk satu minggu.

PLN telah bekerja sama dengan Pertamina untuk menambah pasok BBM sebanyak 400 ton, agar listrik bisa dialirkan selama 12 jam per hari selama satu bulan.

Dengan demikian, secara umum di Provinsi NAD sudah semakin baik. Listrik di Banda Aceh telah pulih 60 persen dengan beban puncak 28 Megawatt (MW), Langsa, Subulussalam, dan Biruen masing-masing pulih 100 persen.

Kondisi listrik di Pulau Nias juga sudah pulih seratus persen, sedangkan di Lhokseumawe 90 persen, Sigli 80 persen, dan Meulaboh 16 persen. Jumlah pelanggan PLN di Banda Aceh yang kondisi listrik rumahnya telah normal mencapai 16.000 pelanggan dari rencana 34.000 pelanggan yang dinyalakan.

Sebagai wujud empati bagi para korban bencana, PLN membentuk "Tim PLN Peduli Bencana" dengan misi kemanusiaan dan memulihkan sistem kelistrikan di negeri Serambi Mekah itu. (dan)

HUBUNGAN MASYARAKAT
DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

MONITOR BERITA

<ul style="list-style-type: none"> ● BISNIS INDONESIA ○ KOMPAS ○ KORAN TEMPO ○ MEDIA INDONESIA ○ NERACA ○ PIKIRAN RAKYAT ○ RAKYAT MERDEKA ○ REPUBLIKA ○ SUARA KARYA ○ SUARA PEMBARUAN 	<ul style="list-style-type: none"> ○ INVESTOR DAILY ○ SINAR HARAPAN ○ THE JAKARTA POST ○ MAJALAH GATRA ○ MAJALAH TEMPO ○ MAJALAH FORUM ○ MAJALAH PILARS ○ MAJALAH TRUST ○
KODE: <input checked="" type="checkbox"/> LISTRIK <input type="checkbox"/> MIGAS	<input type="checkbox"/> GEOLOGI DAN SUMBER DAYA MINERAL <input type="checkbox"/> UMUM
JAN FEB MAR APR MEI JUN 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 HALAMAN: 6	JUL AGST SEPT OKT NOV DES 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 TAHUN 2005

PLN Sidoarjo siap pasok listrik ke industri

SIDOARJO, Jawa Timur (Bisnis): PT PLN Area Pelayanan & Jaringan Sidoarjo menyatakan kesiapannya memasok energi listrik ke wilayah Industri Sidoarjo-Jabon-Krian (Siborian) yang dikembangkan pemda setempat.

Manajer PT PLN APJ Sidoarjo, Rusbandi, mengakui tingkat kebutuhan energi listrik di wilayah Kab. Sidoarjo—terutama dari sektor industri—cenderung semakin tinggi dengan tingkat pertumbuhan permintaan tahun ini 12% dan kondisi beban puncak 206 MW, melalui pelayanan terhadap 280.000 pelanggan.

Menurut dia, PT PLN APJ Sidoarjo tetap mampu memenuhi pengajuan pemasangan sambungan baru energi listrik, termasuk kebutuhan ka-

langan industri di wilayah Siborian.

"Kami sejauh ini belum diajak Pemkab Sidoarjo untuk membahas penyediaan energi listrik di wilayah industri Siborian, tetapi kami prinsipnya siap melayani pasokan terhadap industri baru," ujarnya, kemarin.

Rusbandi menambahkan saat ini terdapat dua industri baja di wilayah Krian yang membutuhkan listrik 46 MW masing-masing PT Tunggal Jaya Steel dan PT Perkasa Perdana Putra, dimana PT PLN APJ Sidoarjo tengah menyiapkan sambungan instalasi ke perusahaan tersebut.

Selain itu, terdapat 10 industri skala menengah mengajukan sambungan baru energi listrik dengan kebutuhan 200 kVA per perusahaan. (aac)